

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2010. *Kendala Penerapan SAP oleh Pemerintah Daerah*. Diakses tanggal 1 July 2019 dari : <https://syukriy.wordpress.com/2009/02/26/kendala-penerapan-sap-oleh-pemerintah-daerah/>
- Abiding Khoirul M, Afifudin dan Junaidi. 2018. *Pengaruh Implementasi SIMDA, Kualitas SDM dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang*. E-JRA Vol 7 No. 10. Hal : 138.
- Achmad, S. Ruky. 2003. *Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal : 57.
- Ancok, Djamaludin. 2009. *Validitas dan Peliabilitas Instrumen Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi*. Jakarta : LP3 ES. Hal : 137.
- Anggraeni, D.T. dan Riduwan, A. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol.3 No.3. Hal : 45.
- Arens, A.A, Elder R.J, dan Beasley, M.S. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance. Edisi Kelima Belas Jilid 1*. Alih Bahasa: Herman Wibowo dan Tim Perti. 2014 Jakarta : Erlangga. Hal : 345.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga. Hal: 9.
- Budi Purbayu Santosa dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Yogyakarta : Andi Offse. Hal 125.
- Darwanis dan Mahyani, Dwi D. 2009. *Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Telaah dan Risert Akuntansi Vol 2 No 2 Juli 2009. Hal 133-151.
- Dwi, Ratmono & Mahfud, Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yoyakarta. Hal : 19.
- Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian. Hal : 21.
- Fikri, Inapty dan Martiningsih, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Tahun 2015. Hal : 27-42.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal 34.
- Harahap Sofyan Safri, 2002. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal : 105.
- Haq, Ahmad Abdul. 2014. *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah*. Diakses tanggal 6 September 2019, dari : <http://www.wikiapbn.org/kerangka-konseptual-akuntansi-pemerintahan/>
- Hutapea, Parulin dan Nuriana, Thoha. *Kompetensi Plus Teori, Desain Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. 2008. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal : 97.
- Irwan, D. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat*. Tesis. Universitas Negeri Padang. Hal : 36.
- Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. *Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5 No. 2 Hal. 214-228.
- Mahaputra, Rahma Upabayu I.P. dan Putra, I.W. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2. Hal : 230-244 .
- Mahardini Nikke Yusnita Dan Ade Miranti. 2018. *Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi SDM Pada Kualitas Lporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2015*. Jurnal Akuntansi, Vol 5 No. 1. Hal : 31.
- Mahsun et al, 2013. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke-4*. BPFE UGM, Yogyakarta. Hal : 25.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta. Hal : 13.
- Manaf, Arfan dan Darwanis. 2014. *Pengaruh pemahaman tentang SAP dan Sistem Pengendalian Intern terhadap proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan implikasinya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kab/Kota di Prov Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. 3 No.4 ISSN 2302-0164. Hal : 23-36.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta : Andi Offset. Hal : 159.

- Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Press. Hal : 5.
- Mulyana, Budi. 2010. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Penggunaan Informasi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Hal : 96.
- Muindro Renyowijoyo. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hal : 171.
- Ningtyas, Eka Pravitasari dan Widyawati, Dini. 2015. *Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan PemDa*. Jurnal ilmu & Risert Akuntansi Vol.4 No1. Hal : 63.
- Nordiawan, D. dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2* Jakarta: Salemba Empat. Hal 21.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam, 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1 Vol. 13. Hal 48-58.
- Pujanira, Putriasri dan Taman Abdullah. 2017. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan PemDa Provinsi DIY*. Jurnal Nominal Vol.VI No.2. Hal : 26.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- , 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- , 2008. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- , 2006. *Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- , 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang SAP*.
- , 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- , 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- Ritonga, Andika Fransiska. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada DPKAD Pemerintahan Kota Bandung* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung). Hal : 106.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM. Hal 142 – 164.
- Rudolf Wennemar Matindas. 2013. *Manajemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha*. Jakarta : Edisi II Grafiti. Hal 89.
- Ruki. Ahmad. S. 2003. *Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal : 5.
- Sako, Umar dan Lantowa Felmi D. 2018. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. *Jurnal Of Accounting Science* Vol.2 No.1. Hal : 53.
- Salim, Sutaryo dkk. 2011. *Manajemen SDM (Total Human Resources Champion Management)*. Pangkal pinang : UBB Press. Hal : 61.
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen PNSI*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal : 193.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat. Hal 104-126.
- Setyowati dan Isthika. 2014. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada PemKot Semarang*. *Proceedings SNEB 2014*. Hal 1-8.
- Siahaan dan Fachruzamman, 2013. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanggerang*. Universitas Bina Nusantara. Hal : 1-8.
- Sudarmanto. 2015. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, edisi tiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal : 54.
- Sudiarianti, Ni Made, dkk. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Simposium Nasional Akuntansi 18*. Universitas Sumatera Utara, Medan. Hal : 5.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal : 106, 154.

- , 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta. Hal : 80.
- Susilawati dan Dwi Seftihani Riana. 2014. *Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung : STAR-Study & Accounting Research. Vol. XI, No. 1. Hal : 96.
- Stoner J.A.F. 1996. *Manajemen. Alih Bahasa: Alexander Sindoro dan Bambang Sayaka*. Jakarta : PT. Prenhalindo. Hal : 1.
- Syaripudin, 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Jurnal Fokus Bisnis Vol.14 No.02. Hal : 1-24.
- Tanjung, Abdul Hafihz. 2012. *Akuntansi pemerintahan daerah, konsep dan aplikasi*. cetakan kedua. Alfabeta Bandung. Hal : 73-82.
- Udiyanti, Atmadja dan Darmawan. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2 No 1. Hal : 1-11.
- Wahyono, Teguh. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Andi. Hal 12.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja. Edisi Kedua*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal : 110.
- Wijaya, Henryanto. 2008. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) Untun Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel*. Jurnal Akuntansi/ Tahun X II No.3. Hal 1-14.
- Wyatt, E., Sutter, S.H., & Drake, L.A., 2001, *Dermatology Pharmacology, in Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*, Hardman, J.G., Limbird, L.E., Gilman, A.G., (Editor), 10th Edition, 1797, New York, McGraw-Hill. Hal : 101.
- Yujana, Lalu Hendri. 2008. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Hal : 171.
- Zeyn, E., 2011. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37.

Dinas Daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga serta urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
11. Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
13. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
14. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kebencanaan, Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang
6. Inspektorat Kota Padang Panjang

Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B;
2. Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.